

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Adanya reformasi pada organisasi sektor publik yang mengadopsi pendekatan pada praktik dan manajemen swasta untuk meningkatkan kinerja, berdampak pada perubahan sistem akuntansi organisasi sektor publik (Mardiasmo, 2018: 20). Di Indonesia reformasi pada organisasi sektor publik menyebabkan perubahan signifikan terhadap akuntansi sektor publik. Selain itu organisasi sektor publik juga dituntut untuk dikelola secara profesional dan efisien dengan berupaya memberikan pelayanan terbaik secara transparan dan berakuntabilitas (Nordiawan, 2006: 4).

Laporan keuangan merupakan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan oleh manajemen sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pihak luar perusahaan tentang data keuangan atau aktivitas perusahaan tersebut selama periode tertentu bisa juga disebut dengan gambaran dari sebuah perusahaan. PSAK No.1 (2013) mengemukakan bahwa tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi tentang posisi keuangan, kinerja dan arus kas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna dalam rangka membuat keputusan-keputusan ekonomi serta menunjukkan pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumberdaya-sumberdaya yang dipercayakan kepadanya (Mudasetia dan Solikhah, 2017).

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja

perusahaan tersebut. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Tahun 2009, pengertian laporan keuangan adalah bagian dari proses pelaporan keuangan, laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan posisi (yang disajikan dalam berbagai cara misalnya sebagai laporan arus kas atau arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah merupakan suatu hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut.

Ada beberapa karakteristik agar laporan keuangan yang dihasilkan oleh suatu badan atau organisasi dikatakan baik. Dalam karakteristik kualitatif laporan keuangan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual adalah pertama, laporan keuangan pemerintah daerah harus relevan. Laporan keuangan dapat dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna laporan keuangan dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini, dan memprediksi masa depan, serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Informasi laporan keuangan yang relevan dapat bermakna bagi penggunanya.

Karakteristik kualitatif yang kedua adalah andal, informasi keuangan dapat dikatakan andal apabila informasi yang termuat dalam laporan keuangan

bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi keuangan mungkin dapat dikatakan relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik penyajian jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas. Ketiga yaitu laporan keuangan pemerintah daerah dapat dibandingkan. Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah daerah yang keempat adalah dapat dipahami. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna

Sebagai upaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, dikembangkan suatu standar akuntansi pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Menurut Nordiawan (2006: 25), tujuan adanya SAP akan berdampak padapeningkatan kualitas laporan keuangan pusat maupun daerah. Sehingga informasi keuangan pemerintah dapat menjadi dasar pengambilan keputusan dan terwujudnya transparansi serta akuntabilitas. Rumah sakit merupakan salah satu insitusi yang memberikan jasa pelayanan kesehatan bagi masyarakat (UU No.4 tahun 2009). Untuk memaksimalkan tingkat efisiensi dan tingkat pelayanan rumah sakit dan puskesmas dapat

menerapkan system BLUD (Badan Layanan Umum Daerah). Sistem BLUD merupakan sebuah system yang lebih menekankan tingkat pelaporan laporan keuangan dan hasil laporan keuangan yang dihasilkan lebih kompleks dan lebih tertata.

**TABEL 1.1**  
**LAPORAN RSUD KAYEN SEBELUM DAN SETELAH**  
**PENERAPAN BLUD**

No	Pendapatan Asli Daerah – LO	Rata rata Anggaran Sebelum BLUD	Rata rata Anggaran sesudah BLUD
		(Rp)	(Rp)
1	Laporan Realisasi Anggaran	6,742,300,842	14,586,306,210
2	Laporan Perubahan Saldo Anggaran	Belum ada	(22,362,015,000)
3	Laporan Operasional	6,815,209,280	28,955,743,314
4	Laporan Arus Kas	Belum ada	2,287,076,262
5	Catatan Atas Laporan Keuangan	Ada	Ada

Sumber: BLUD RSUD Kayen, 2020

Dalam penerapan sistem BLUD Rumah Sakit Kayen agar dapat tercapai secara optimal maka tata kelola rumah sakit harus baik dan efisien. Penerapan BLUD sebelum dan sesudah di RSUD Dalam Laporan Realisasi Anggaran Mengalami peningkatan cukup signifikan terpaut selisih sebesar Rp 7,844,005,379 milyar. Dalam Laporan Perusabahan saldo anggaran pada tahun sebelum penerapan BLUD belum diwajibkan untuk melaporkan laporan laporan perubahan saldo Anggaran tersebut sehingga belum diketahui hasil LPSAL dan pada tahun setelah penerapan BLUD sudah mewajibkan untuk melaporkan

LPSAL dan hasil yang diperoleh sebesar Rp – 22,362,015,000 hal ini disebabkan karena defisit pendapatan yang diperoleh dengan Anggaran Belanja yang dimiliki oleh Pihak RSUD. Dalam laporan Operasional rata rata pendapatan yang diperoleh sebelum penerapan BLUD sebesar Rp 6,815,209,280 dan sesudah penerapan BLUD sebesar Rp 28,955,743,314 terdapat selisih Rp 22,140,534,100. Dalam laporan Arus kas sebelum penerapan BLUD tidak mewajibkan untuk membuat Laporan Arus Kas dan sesudah penerapan BLUD diperoleh hasil sebesar Rp 2,287,076,262 (RSUD Kayen, 2020).

Dapat disimpulkan bahwa sebelum adanya kebijakan BLUD di Rumah sakit Kayen kualitas informasi laporan yang dihasilkan masih terbilang minim dan tidak menyeluruh hal ini dapat dibuktikan dengan belum adanya laporan perubahan saldo anggaran dan laporan arus kas di laporan keuangan sebelum penerapan system BLUD. Semakin kompleks laporan keuangan yang dihasilkan maka akan semakin baik kualitas informasi dalam laporan keuangan tersebut. Hal ini sesuai dengan penelitian (Dian, 2017) yang menyatakan bahwa penerapan BLUD berpengaruh terhadap Laporan Keuangan. Sistem pengelolaan keuangan yang bagus membutuhkan Sumber daya manusia yang kompeten dan handal. Inilah yang akan menjadi kendala rumah sakit yang akan menerapkan system.

Berdasarkan pernyataan tersebut ada beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan diantaranya adalah Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah dan Teknologi Informasi. Faktor pertama yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan adalah Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan suatu hal yang sangat



penting bagi keberlangsungan Rumah sakit. Semakin kompeten sumber daya manusia maka semakin andal dan semakin baik kualitas laporan keuangan yang akan dihasilkan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nonce (2017) menyimpulkan bahwa sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan hal. Namun hasil berbeda dikemukakan oleh (Harlinda, 2016) dan (Sukmaningrum and Harto, 2016) yang menyatakan bahwa Sumber daya manusia berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Faktor kedua yang mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan adalah Sistem Pengendalian Internal. Sistem Pengendalian Internal adalah sistem dan prosedur yang terlibat dalam usaha untuk menjaga dan melindungi asset serta untuk mengelola informasi secara akurat sesuai peraturan hukum yang berlaku. Sistem Pengendalian Internal yang bagus dan efisien akan meminimalisir terjadinya penyimpangan penyimpangan yang kemungkinan terjadi. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Nonce 2017) dan (Ariefsetya Darmawan, 2019) menyimpulkan bahwa Sistem Pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan Namun hasil berbeda dikemukakan oleh (Sukmaningrum and Harto, 2016) dan (Rangkuti, 2019) yang menyatakan bahwa Sistem Pengendalian Internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Faktor ketiga yang mempengaruhi Kualitas informasi laporan keuangan adalah Standar Akuntansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintah adalah peraturan peraturan yang digunakan untuk mengefisienkan hasil yang akan

dilaporkan sehingga bukan hanya andal tapi juga mudah dimengerti oleh pihak pihak yang ingin melihat laporan tersebut. Standar yang digunakan juga dapat menghindarkan tindakan tindakan yang dapat merugikan misalnya manipulasi, hal ini karena standar pemerintah digunakan sebagai patokan dan apabila laporan yang dihasilkan tidak sesuai dengan standar yang digunakan maka akan ada sanksi yang ditanggung pihak melaporkan laporan tersebut. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dian, 2017) dan (Ariefsetya Darmawan, 2019) menyimpulkan bahwa Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Dian, 2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yang pertama yaitu penambahan variabel teknologi informasi. Alasan menambahkan variabel teknologi informasi karena teknologi informasi merupakan suatu sistem yang dibuat yang bertujuan untuk mengefisienkan tenaga dan hasil yang akan dilaporkan akan selesai lebih cepat. Teknologi informasi didefinisikan sebagai perpaduan antara teknologi komputer dengan teknologi komunikasi dengan teknologi lainnya seperti perangkat keras dan perangkat lunak, database dan teknologi jaringan. Teknologi informasi dipakai dalam organisasi untuk menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para pemakai informasi. Pembuatan laporan pasti akan mengandalkan teknologi seperti *computer*, *hardware* dan *software* untuk mengurangi tingkat *human error* dalam pembuatan laporan keuangan, semakin baik organisasi memanfaatkan teknologi maka semakin bagus kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang

dilakukan oleh (Harlinda, 2016) yang menyatakan bahwa teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Perbedaan kedua pada penelitian ini adalah objek yang digunakan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Dian, 2017) adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sebagai objek penelitian sedangkan dalam penelitian ini menggunakan rumah sakit daerah dan puskesmas sebagai objek penelitian. Alasan menggunakan rumah sakit daerah dan Puskesmas yang menggunakan sistem BLUD sebagai objek penelitian dikarenakan Badan Layanan Umum Daerah menggunakan tata kelola keuangan yang berbeda dari Organisasi Perangkat Daerah yang lain salah satunya dalam kompleksitas laporan keuangan yang dihasilkan sehingga cocok untuk dijadikan sebagai objek penelitian.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini mengambil judul **“PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA, PENGENDALIAN INTERNAL, STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, DAN TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (STUDI EMPIRIS PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH SE-KABUPATEN PATI)”**

## **1.2 Ruang Lingkup**

Penelitian ini membatasi ruang lingkup penelitian yang akan dilaksanakan agar penelitian lebih terfokus pokok permasalahan yang ada dan sesuai sasaran yang tepat, ruang lingkup penelitian ini adalah:

1. Variabel independen yang digunakan adalah Sumber Daya manusia, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah dan



Teknologi Informasi sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Informasi Laporan Keuangan.

2. Populasi yang akan diambil dalam penelitian ini adalah Badan layanan umum daerah Kabupaten Pati adapun pemilihan sampel yang akan digunakan adalah karyawan di rumah sakit dan puskesmas daerah Kabupaten Pati.

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, kompleksitas informasi dalam laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kayen sebelum diberlakukannya penerapan BLUD sangat minim hal ini dapat dilihat dalam tabel 1.1 mengenai jumlah sub laporan yang dihasilkan dalam laporan keuangan. Ada beberapa yang belum dilaporkan seperti laporan perubahan saldo anggaran dan laporan arus kas. Faktor- faktor yang dapat mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan yaitu Sumber daya manusia, pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah dan teknologi informasi. Rumusan masalah yang disampaikan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaruh Sumber daya manusia, pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah dan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris mengenai pengaruh Sumber daya manusia, pengendalian internal, standar akuntansi pemerintah dan teknologi informasi terhadap kualitas informasi laporan keuangan pada Rumah Sakit dan Puskesmas se Kabupaten Pati. Teori yang melandasi penelitian ini adalah

teori agensi yang menggambarkan hubungan kontrak yang terjadi antara prinsipal dan pihak agen yang akan menimbulkan konflik kepentingan, dimana masing-masing pihak berusaha untuk memenuhi kebutuhan masing-masing. Prinsipal menginginkan hasil yang besar pada investasi yang dilakukan sedangkan pihak agen menginginkan kompensasi yang tinggi atas kinerja yang dilakukan. Pihak agen akan menyusun laporan keuangan yang berintegritas tinggi yang tidak menyesatkan para pemakainya, agar tidak mengecewakan pihak prinsipal. Pihak agen bertindak sesuai keinginan pihak prinsipal maka pihak prinsipal akan memberikan insentif yang pantas bagi agen dan mengawasi biaya-biaya yang timbul untuk membatasi aktivitas agen yang menyimpang.

### **1.5 Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi untuk berbagai pihak, kegunaan penelitian ini adalah :

#### **1. Bagi Pemerintah Daerah**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan menambah ilmu pengetahuan pada variabel Kualitas informasi laporan keuangan terhadap Sumber daya manusia, Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintah dan Teknologi Informasi. Dari sini diperoleh bahan dan masukan bagi pemerintah untuk membuat kebijakan dan menentukan tujuan selanjutnya.

#### **2. Bagi Rumah sakit umum dan puskesmas daerah Kabupaten Pati**

Dari sini dapat diperoleh masukan bagi Rumah sakit umum daerah Pati dapat digunakan untuk mengambil kebijakan yang dianggap perlu

atas dasar penelitian dan dapat digunakan sebagai bahan acuan untuk menambah wawasan di bidang akuntansi khususnya yang berkaitan dengan Kualitas Informasi laporan keuangan.

